



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 440 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUP
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, dipandang perlu mengubah Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 440 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN
2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUP
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten dan/atau Tersertifikasi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	$A = \left(\frac{B + C + D}{B1 + C1 + D1} \right) \times 100\%$ A = Persentase Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan KP Kompeten Dan Atau Tersertifikasi Yang Terserap Di Dunia Usaha, Dunia Industri Dan Atau Dunia Kerja (DUDIKA) B= Lulusan pendidikan (taruna/i) yang terserap DUDIKA dengan masa tunggu maksimal 1 tahun B1= Lulusan pendidikan KP	• Pusat Pelatihan KP • Pusat Pendidikan KP • Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				C = Lulusan pelatihan (masyarakat KP) yang terserap DUDIKA C1= Lulusan pelatihan KP D = Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi tanpa mengikuti pendidikan/pelatihan di lingkup BPPSDM KP yang terserap DUDIKA D1= Masyarakat KP yang lulus ujian kompetensi tanpa mengikuti pendidikan/pelatihan di lingkup BPPSDM KP	
		2	Persentase Peningkatan Omzet pada Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	$A = \frac{B}{C} \times 100\%$ A = persentase kelompok yang meningkat omzetnya pada kelompok yang meningkat kelasnya B = kelompok pelaku usaha yang meningkat omzet dan kelasnya C = kelompok pelaku usaha yang meningkat kelasnya	Pusat Penyuluhan KP
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan	3	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (nilai)	Capaian Indeks RB KKP berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi RB di KKP dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB Penilaian indeks RB dilakukan terhadap pelaksanaan RB tahun 2025. Apabila capaian Indeks RB dari Kementerian PAN dan RB belum rilis pada tahun berjalan, maka nilai capaian akan menggunakan nilai capaian tahun sebelumnya	Sekretariat BPPSDM KP

INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BPPSDM}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BPPSDM}} \times 100\%$	Tim Kerja Keuangan
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan kepatuhan BPK pada LK BPPSDM Tahun 2024}}{\text{Jumlah Realisasi anggaran BPPSDM Tahun 2024}} \times 100\%$	Tim Kerja Keuangan
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$	Tim Kerja Keuangan
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP (Level)	- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP. - Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas: - Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I - Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP	Tim Kerja Keuangan
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.	Tim Kerja Monitoring,

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR									
				Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja (30%), 2. pengukuran kinerja (30%), 3. pelaporan kinerja (15%), dan 4. evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	Evaluasi, dan Pelaporan									
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	$NKPA_{UEI} = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker <table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td rowspan="2">Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td><td>30</td></tr><tr><td>2. Nilai Efektifitas Satker</td><td>45</td></tr><tr><td>Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr></table>	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30	2. Nilai Efektifitas Satker	45	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker
Variabel	Uraian	Bobot (%)												
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30												
	2. Nilai Efektifitas Satker	45												
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25												

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR								
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP(Nilai) - Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP. - Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas: 1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I 2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP <table> <tr> <td>Nilai</td> <td>Kategori</td> </tr> <tr> <td>1,7 – 2</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>1,2 – 1,69</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>< 1,2</td> <td>Kurang</td> </tr> </table>	Nilai	Kategori	1,7 – 2	Baik	>1,2 – 1,69	Sedang	< 1,2	Kurang	Tim Kerja Program
Nilai	Kategori											
1,7 – 2	Baik											
>1,2 – 1,69	Sedang											
< 1,2	Kurang											
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas (%) Pengelolaan Belanja Lingkup BPPSDM terdiri dari komponen: - Penelaahan Revisi Anggaran - Persetujuan Revisi Anggaran - Pengajuan Revisi Anggaran - Surat Persetujuan Revisi Anggaran Indeks Penyelesaian Revisi Anggaran (IPRA) $IPRA = \frac{\left(\frac{A + B + C + D}{100} \right)}{n}$ Keterangan: IPRA = Indeks Penyelesaian Revisi Anggaran A = Dokumen Penelaahan Revisi B = Dokumen Persetujuan Revisi C = Dokumen Pengajuan Revisi D = Dokumen SPRA n = Banyaknya Usulan Revisi Anggaran Nilai Indeks Tertinggi: 1 Periode Penghitungan: Semester	Tim Kerja Program								

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				Indeks Penyelesaian Dokumen Penganggaran (IPDA) $IPDA = \frac{A + B + C + D + E + F}{100} \times 100\%$ Keterangan: IPDA = Indeks Penyelesaian Dokumen Penganggaran A = Dokumen Penyusunan Pagu Awal B = Dokumen Penyusunan Pagu Anggaran C = Dokumen QC Pagu Anggaran D = Dokumen Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran E = Dokumen QC Pagu Alokasi Anggaran F = Dokumen Penganggaran Nilai Indeks Tertinggi: 100% Periode Penghitungan: Triwulan Indeks Perencanaan Anggaran yang Berkualitas (IEPA) $IEPA = \frac{\left(\frac{IPRA}{IPRA\ ideal} \times 100\% \right) + IPDA}{2}$ Keterangan: IEPA = Indeks Efektifitas Perencanaan Anggaran IPRA = Indeks Penyelesaian Revisi Anggaran IPRA ideal = 1 IPDA = Indeks Penyelesaian Dokumen Penganggaran Periode Penghitungan: Tahunan Nilai Indeks Tertinggi: 100	
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi: - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)	Tim Kerja SDMAO

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%) e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (Indeks)	$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$ $\text{Nilai IP ASN Unit Organisasi} = \frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$	Tim Kerja SDMAO
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP (%)	Variabel 1 (V1) = Probis Level 2 seluruhnya telah selesai disusun (15%), tidak selesai (0%). Data dukung: Hasil verifikasi dan persetujuan atas usulan Probis Level 2 dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Variabel 2 (V2) = $\frac{\text{jumlah Probis Level 3 yang selesai disusun dan telah di verifikasi}}{\text{jumlah Probis Level 3 yang harus disusun}} \times 40\%$ Data dukung: Dokumen probis level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi.	Tim Kerja SDMAO

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		Variabel 3 (V3) = Identifikasi Judul SOP seluruhnya telah selesai disusun (10%), tidak selesai (0%) Data dukung: Matriks Identifikasi Judul SOP berdasarkan dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. Variabel 4 (V4) = $\frac{\text{jumlah SOP yang selesai disusun dan telah diverifikasi}}{\text{jumlah SOP yang harus disusun}} \times 25\%$ Data dukung: Dokumen SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai dengan matriks identifikasi judul SOP Variabel 5 (V5) = - Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3 (5%); - hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau - tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%). Data dukung: - Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan - Dokumen Probis Level 3 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi.	

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				Variabel 6 (V6) = a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (5%); b. hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%). Data dukung: a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan b. Dokumen SOP yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.	
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP (Satker)	- Tim Pendamping dari BPPSDM menilai dan pendampingi unit kerja yang diusulkan sebagai WBK yang didampingi dalam memenuhi nilai minimal 30 indikator proses - Unit yang dibangun menuju predikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam SK Kepala BPPSDM. - Penghitungan berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja dibangun menuju WBK pada tahun 2025 hasil pendampingan	Tim Kerja SDMAO
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri	$x = \frac{a}{b} \times 100\%$ x= Persentase Penyelesaian Progsun Permen Kepmen	Tim Kerja Hukum

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
			Lingkup BPPSDMKP (%)	a= Jumlah R.Permen KP dan R.Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 b= Jumlah R. Permen KP dan R.Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kemneterian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP (Rancangan)	Hasil Rancangan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri dilingkup BPPSDM yang disusun, dikirim ke Biro Hukum, dan dibahas secara internal dilingkup KKP.	Tim Kerja Hukum
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani (%)	$x = \frac{a}{b} \times 100\%$ x= persentase perhitungan jumlah permasalahan hukum yang ditangani a=Jumlah permasalahan hukum yang ditangani b=Jumlah permasalahan hukum yang dimintakan/dimohonkan untuk advokasi di Tahun 2025.	Tim Kerja Hukum

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP (dokumen)	Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Peraturan Kepala BPPSDM dan/atau Keputusan Kepala BPPSDM.	Tim Kerja Hukum
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP (Nilai)	Aspek/Formulasi pengukuran /penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a.penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c.penyusutan arsip (25%), d.pemeliharaan arsip (25%). 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)	Bagian Umum
		18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDM KP (unit)	1. Ketepatan Waktu Kontraktual yang tercantum pada Karwas Kontrak, SPK, dan BAST 2. Akselerasi Belanja Modal (Berita Acara Pembayaran Kontrak / BAPP, Laporan Kinerja Bulanan/Tahunan)	Bagian Umum
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini	Tim Kerja PNBP dan Optimalisasi BLU

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%). 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)	Bagian Umum
		21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (Nilai)	Proposal inovasi yang masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 77. Capaian hasil dihitung dengan rumus: $\text{Nilai Capaian} = \frac{N1 + N2 + N \dots}{\text{Total } N}$	Tim Kerja Humas

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				Keterangan: N1 = Nilai Proposal 1 N2 = Nilai Proposal 2 Total N = Jumlah Proposal yang diajukan Nilai capaian = Capaian hasil	
		22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (<i>Self Assessment Quesioner</i>) Tim Penilai Internal KKP	Tim Kerja Humas
		23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP (%)	1.Melakukan inventarisasi Komponen Data yang telah diupdate; 2.Melakukan penghitungan persentase updating komponen data yang sudah diupdate terhadap jumlah komponen Data yang harus diupdate. 3.Perhitungan Persentase Kepatuhan Pengelolaan Data dilihat dari keaktifan dalam melakukan updating pada setiap Komponen Data yang telah ditentukan pada masing- masing aplikasi $\% \text{ data} = \frac{\text{Jumlah Komponen DATA yang telah diupdate}}{\text{Jumlah Komponen DATA yang harus diupdate}} \times 100\%$ •Komponen Aplikasi ELATAR: Data Peserta Didik, Data Pendidik, Data Tenaga Kependidikan, Data Alumni dst. •Komponen Aplikasi ELAUT: Data Pelatihan Masyarakat, Data Pelatihan Aparatur, Data Balai Pelatihan, Dst •Komponen Aplikasi DIGILUH: Data Sebaran Penyuluh Menurut Provinsi, Data Sebaran Penyuluh Menurut Kabupaten/ Kota, Data Penyuluh Menurut Jenjang Jabatan Fungsional, Data Penyuluh Menurut Tingkat Pendidikan, Data Penyuluh Menurut Usia, Data Penyuluh Menurut Jenis Kelamin, Data Jumlah	Tim Kerja Data

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang disuluh Menurut Provinsi, Data Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang disuluh Menurut Bidang Usaha, Data Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang disuluh Menurut Kelas Kelompok, Data Jumlah Kelompok Penyuluhan yang Ditingkatkan, Data Jumlah Kelompok Penyuluhan yang Ditumbuhkan dan Data Percontohan Penyuluhan	
		24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP (%)	1.Melakukan inventarisasi artikel yang telah diterbitkan pada jurnal; 2.Melakukan penghitungan persentase jumlah artikel yang diterbitkan terhadap jumlah artikel yang berdasarkan standar akreditasi. $\% a \dots\dots = \frac{\text{Jumlah artikel yang diterbitkan}}{\text{Jumlah artikel berdasarkan standar akreditasi}} \quad (1)$ $\% \text{ rerata pengelolaan penerbitan artikel} = \frac{a+b+c \dots\dots}{n} \quad (2)$ Keterangan: % Penerbitan Artikel: (Jumlah artikel yang diterbitkan / Jumlah artikel berdasarkan standar akreditasi) x 100% Jumlah artikel: Minimal 5 artikel (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021)	Tim Kerja Data
		25	Nilai PNBP Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya + Nilai PNBP BLU	Tim Kerja PNBP dan Optimalisasi BLU

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		26	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak (%)	Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Kerjasama lingkup antar Lembaga dan internasional dan disepakati BPPSDM Bersama para pihak kerja sama	Tim Kerja Kerja sama
		27	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kyang telah Disepakati (%)	$\text{Tindak Lanjut KS} = \frac{\text{Jumlah KS yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah KS yang masih berlaku di tahun berjalan}} \times 100\%$ Keterangan: Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen kerja sama aktif di tahun berjalan	Tim Kerja Kerja sama
		28	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	$\% \text{ Efektifitas KS} = \frac{\text{jumlah KS Utama}}{\text{Jumlah KS yang disepakati di tahun berjalan}} \times 100\%$ Keterangan: Kerja Sama Utama adalah kerja sama yang mendukung pelaksanaan kinerja dan program prioritas organisasi Kategori Efektifitas KS: Tinggi = 75 – 100% Sedang = 51 – 74% Rendah = ≤ 50%	Tim Kerja Kerja sama

INDIKATOR KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
1	Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	1	Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ C = Persentase Lulusan Pendidikan yang Terserap Di Dunia Usaha, Dunia Industri Dan/Atau Dunia Kerja (DUDIKA) B = Lulusan pendidikan (taruna/i) yang terserap DUDIKA dengan masa tunggu maksimal 1 tahun / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/ mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja A = Lulusan pendidikan KP / Akumulasi jumlah lulusan satuan pendidikan KP pada tahun sebelumnya	Satuan Pendidikan KP
		2	Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan	Satuan Pendidikan KP
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda	Satuan Pendidikan KP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		4	Nilai PNBP satker lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya + Nilai PNBP BLU	Satuan Pendidikan KP
		5	Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama baik dari Pusat Pendidikan KP maupun satuan Pendidikan yang disepakati di tahun berjalan.	Satuan Pendidikan KP
		6	Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah kerja sama yang akan ditindaklanjuti B= Jumlah total kerja sama yang masih berlaku C = persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	Pusat Pendidikan KP
		7	Persentase lulusan satuan pendidikan yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi	Satuan Pendidikan KP
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang	Satuan Pendidikan KP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru $C = \text{Point B dibagi Point A dikalikan } 100\%$	
		9	Persentase peserta didik yang mendukung program prioritas melalui Magang Program Pemerintah (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik yang mengikuti MBKM pada tahun berjalan semester 4 untuk Politeknik KP (D3) dan semester 6 untuk Politeknik AUP (D4) / Jumlah peserta didik pada tahun berjalan semester 4 untuk Politeknik KP (D3) dan semester 6 untuk Politeknik AUP (D4) B= Jumlah peserta didik yang melaksanakan MBKM pada lokasi program prioritas KKP/BPPSDM pada tahun berjalan / Jumlah peserta didik pada tahun berjalan semester 4 untuk Politeknik KP (D3) dan semester 6 untuk Politeknik AUP (D4) yang mengikuti Magang di Program Prioritas Pemerintah C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%	Satuan Pendidikan KP
2		10	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)	Akumulasi Laporan Pelaksanaan Penelitian pendidikan tinggi	Satuan Pendidikan KP
		11	Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	Akumulasi jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mendapatkan pendampingan peningkatan kompetensi oleh satuan pendidikan KP; dan atau Kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung yang menerapkan hasil Pengabdian Pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang diterapkan	Satuan Pendidikan KP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
3		12	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	Akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi	Satuan Pendidikan KP
		13	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan dan Perikanan (NSPK)	Jumlah NSPK yang ditetapkan baik oleh Kepala Pusat Pendidikan KP maupun oleh Kepala BPPSDM pada tahun 2025 atau NSPK yang diusulkan pada tahun 2025 untuk ditetapkan oleh Kepala BPPSDM	Pusat Pendidikan KP
		14	Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: a. Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional b. Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan	Satuan Pendidikan KP
4		15	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	Akumulasi jumlah pengadaan peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan KP	● Politeknik KP Sidoarjo ● Politeknik KP Karawang ● Politeknik KP Dumai ● SUPM Pariaman

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		16	Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	Akumulasi jumlah pengadaan gedung dan bangunan di satuan pendidikan KP / Akumulasi jumlah paket pengadaan prasarana pendidikan KP	• Politeknik KP Sidoarjo • Politeknik KP Karawang • SUPM Pariaman
5	Aparatur KKP yang dididik dan dilatih	17	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	Akumulasi jumlah ASN KKP yang diberikan beasiswa tugas belajar sampai dengan tahun 2025 / Akumulasi jumlah Aparatur KKP yang diberikan beasiswa tugas belajar dibiayai sampai dengan tahun berjalan	Pusat Pendidikan KP
		18	Aparatur KKP yang Diberikan tugas belajar mandiri (Orang)	Akumulasi jumlah ASN KKP yang diberikan rekomendasi izin belajar berdasarkan rencana kebutuhan izin belajar pada tahun 2025 dan atau sisa tahun 2024 / Akumulasi jumlah Aparatur KKP yang diberikan rekomendasi izin belajar / Tugas belajar mandiri pada tahun 2025	Pusat Pendidikan KP
		19	Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)	Akumulasi rekomendasi tugas belajar pada tahun 2025 / Akumulasi Aparatur KKP yang diberikan rekomendasi tugas belajar dibiayai baru maupun perpanjangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, pada tahun berjalan	Pusat Pendidikan KP
6	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	20	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)	• Tim pembina/pendamping BPPSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat Pendidikan KP, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon menuju WBK, untuk menyiapkan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. • Tim pembina/pendamping BPPSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat indikator hasil WBK	• Politeknik KP Dumai • Politeknik KP Sorong • Politeknik KP Kupang • Politeknik KP Bone

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR																									
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$	Pusat Pendidikan KP																								
		22	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang	Pusat Pendidikan KP
		Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																											
A	>80 – 90	Memuaskan																											
BB	>70 – 80	Sangat Baik																											
B	>60 – 70	Baik																											
CC	>50-60	Cukup																											
C	>30 – 50	Kurang																											
D	0 – 30	Sangat Kurang																											
23	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$ $\text{Nilai IP ASN Unit Organisasi} = \frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$	Pusat Pendidikan																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		24	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%) $x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini	Pusat Pendidikan
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Pendidikan KP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).	Pusat Pendidikan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)	
		26	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP (Proposal)	Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang disampaikan dan ditetapkan dalam Berita Acara penilaian oleh Tim Penilai Sekretariat BPPSDMKP.	Pusat Pendidikan
		27	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian	Pusat Pendidikan

INDIKATOR KINERJA
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ C = Persentase Lulusan Pelatihan KP yang Terserap Di Dunia Usaha, Dunia Industri Dan/Atau Dunia Kerja (DUDIKA) B = Lulusan pelatihan (masyarakat KP) yang terserap DUDIKA pada tahun berjalan yang bersumber dari Rupiah Murni A = Lulusan pelatihan KP pada tahun berjalan yang bersumber dari Rupiah Murni	• BPPP Medan • BPPP Tegal • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung • BPPP Ambon

		2	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang terserap Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ C = Persentase Lulusan masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi yang Terserap Di Dunia Usaha, Dunia Industri Dan/Atau Dunia Kerja (DUDIKA) B = Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi tanpa mengikuti pendidikan/pelatihan di lingkup BPPSDM KP yang terserap DUDIKA A = Masyarakat KP yang lulus ujian kompetensi tanpa mengikuti pendidikan/pelatihan di lingkup BPPSDM KP	• BPPP Tegal
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	Akumulasi jumlah masyarakat KP yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan.	• BPPP Medan • BPPP Tegal • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung • BPPP Ambon
		4	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya + Nilai PNBP BLU	• BPPP Medan • BPPP Tegal • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung • BPPP Ambon • BDA Sukamandi
		5	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (orang)	Hitung jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP.	• BPPP Medan • BPPP Tegal • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung • BPPP Ambon

	6	Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	Jumlah Desa/lokasi kegiatan dukungan/fasilitasi sarana pada lokasi SFV BPPSDMKP	BPPP Banyuwangi
	7	Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (Paket)	Jumlah Paket Kaji Widya yang dihasilkan	Pusat Pelatihan KP
	8	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK)	Hitung jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi KP	Pusat Pelatihan KP
	9	Jejaring dan/atau kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	Hitung Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen kerja sama lingkup antar lembaga dan internasional yang telah disepakati Pusat Pelatihan KP bersama oleh para pihak kerja sama	Pusat Pelatihan KP
	10	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	Hitung jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang ada di Pusat Pelatihan KP	Pusat Pelatihan KP
	11	Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	Hitung jumlah Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Teknis Kelautan dan Perikanan dan Program Diklat Kepelautan yang disahkan dibagi dengan jumlah usulan yang masuk ke Pusat Pelatihan KP/ Komite Approval.	Pusat Pelatihan KP
	12	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal	BPPP Tegal

		13	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	Jumlah Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal	BPPP Tegal
4	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	14	Aparatur KP yang dilatih (orang)	Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode blended training maupun fullonline training dan dinyatakan lulus Diklat serta mendapatkan sertifikat Diklat.	BDA Sukamandi
		15	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	Jumlah instruktur dan widyaiswara yang tersertifikasi	BDA Sukamandi
		16	Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)	Hitung Jumlah usulan program pelatihan yang dikelompokkan sesuai bidang keahlian	Pusat Pelatihan KP
		17	Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	Hitung jumlah Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan	BDA Sukamandi
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya	18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil	Pusat Pelatihan KP

Manusia Kelautan dan Perikanan			pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan C. Persentase layanan dukungan manajemen internal	
	19	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	Hasil pendampingan dan/atau penilaian dari Tim pendamping internal BPPSDMKP	Pusat Pelatihan KP
	20	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$ $\text{Nilai IP ASN Unit Organisasi} = \frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$	Pusat Pelatihan KP
	21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Pusat Pelatihan KP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BPPSDM}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BPPSDM}} \times 100\%$	Pusat Pelatihan KP
	22	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja	Pusat Pelatihan KP

			Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang				
Kategori	Nilai	Predikat																													
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																													
A	>80 – 90	Memuaskan																													
BB	>70 – 80	Sangat Baik																													
B	>60 – 70	Baik																													
CC	>50-60	Cukup																													
C	>30 – 50	Kurang																													
D	0 – 30	Sangat Kurang																													
	23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Pelatihan KP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);	Pusat Pelatihan KP																											

			4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%). 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)	
		24	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%) $x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	Pusat Pelatihan KP

INDIKATOR KINERJA
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	$C = \frac{A}{B} \times 100\%$ A = Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang meningkat kelas kemampuannya selama dua tahun terakhir B = Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang mendapatkan pendampingan pada tahun sebelumnya C = Persentase kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang ditingkatkan kelasnya	Tim Kerja Kelembagaan Penyuluhan Pusluh KP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.	• BBRBLPP • BRPPUPP • BRPBAPPP • BRPBATPP • BPPP Ambon • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung • BPPP Medan
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuannya setelah mendapatkan pendampingan dari Penyuluh Perikanan, sesuai dengan Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.	• BBRBLPP • BRPPUPP • BRPBAPPP • BRPBATPP • BPPP Ambon • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung • BPPP Medan
		4	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, sesuai Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan	• BBRBLPP • BRPPUPP • BRPBAPPP • BRPBATPP • BPPP Ambon • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung • BPPP Medan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.	
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)	Jumlah Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan dan/atau peraturan lainnya yang berlaku.	• BBRBLPP • BRPPUPP • BRPBAPPP • BRPBATPP • BPPP Ambon • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung • BPPP Medan
		6	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Miliar)	Nilai PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan yang diperoleh dari jumlah nilai PNBP SDA dan nilai PNBP lainnya	• Tim Kerja Tata Kelola Pusluh KP • BBRBLPP • BRPPUPP • BRPBAPPP • BRPBATPP
		7	Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)	Jumlah inovasi teknologi sesuai materi penyuluhan yang direkomendasikan untuk diterapkan dalam kegiatan penyuluhan masyarakat kelautan dan perikanan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.	Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Pusluh KP
		8.a	Materi/Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	Jumlah materi dan/atau metode penyuluhan yang disusun, distandarkan dan ditetapkan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.	Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Pusluh KP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		8.b	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun (Paket)	Jumlah media penyuluhan yang disusun oleh UPT Penyuluhan yang mengandung pengembangan sumber daya manusia; peningkatan modal sosial budaya; ilmu pengetahuan dan teknologi; informasi; ekonomi; manajemen; hukum; dan/atau pelestarian lingkungan. Media penyuluhan dapat berupa media terdengar, media cetak, media tertayang dan/atau media sosial, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.	• BBRBLPP • BRPPUPP • BRPBAPPP • BRPBATPP • BPPP Ambon • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung • BPPP Medan
		9	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	Jumlah kegiatan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui penerapan teknologi terekomendasi, termasuk penerapan metode dan praktik usaha yang telah terbukti keberhasilannya yang diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, sesuai Petunjuk Teknis Percontohan Penyuluhan yang berlaku.	• Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Pusluh KP • BRPBAPPP
		10	Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (Orang)	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.	• Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Pusluh KP • BBRBLPP • BRPPUPP • BRPBAPPP • BRPBATPP • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis (%)	$C = \frac{A}{B} \times 100\%$ A = Jumlah penyuluh yang lulus pelatihan teknis dalam periode dua tahun terakhir B = Jumlah seluruh penyuluh perikanan C = Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis	• Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Pusluh KP • BBRBLPP • BRPPUPP • BRPBAPPP • BRPBATPP • BPPP Ambon • BPPP Banyuwangi • BPPP Bitung • BPPP Medan
		12	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan KP (NSPK)	Jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Penyuluhan pada Tahun 2025. NSPK disusun dengan melibatkan <i>Stakeholder</i> dan Bagian Hukum Sekretariat BPPSDM dan atau Biro Hukum sesuai dengan tingkat kewenangan NSPK yang dibuat.	Tim Kerja Tata Kelola Pusluh KP
		13	Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	Jumlah basis data yang dikelola oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Tim Kerja Tata Kelola Penyuluhan Pusluh KP
		14	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan internasional yang telah disepakati oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain	Tim Kerja Tata Kelola Penyuluhan Pusluh KP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR										
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	$x = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusluh KP}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Pusluh KP}} \times 100\%$	Tim Kerja Dukungan Manajerial Pusluh KP										
		16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) + (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$	Tim Kerja Dukungan Manajerial Pusluh KP										
		17	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat empat aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80
Kategori	Nilai	Predikat													
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan													
A	>80 – 90	Memuaskan													
BB	>70 – 80	Sangat Baik													

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				B	>60 – 70	Baik	
				CC	>50 – 60	Cukup	
				C	>30 – 50	Kurang	
				D	0 – 30	Sangat Kurang	
		18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	Hasil penjumlahan Capaian RO, Penggunaan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Efisiensi SBK yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing. Formula perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Nilai Efisiensi Alokasi			Tim Kerja Dukungan Manajerial Pusluh KP
		19	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin $= \frac{\text{Nilai IP ASN Unit Organisasi}}{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}} \times 100\%$			Tim Kerja Dukungan Manajerial Pusluh KP
		20	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	$x = \frac{\text{Nilai Pagu pada Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Catatan: Jika nilai pagu pada RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase			Tim Kerja Dukungan Manajerial Pusluh KP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				capaian melebihi 100%, maka kelebihan persentase tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Penyuluhan KP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025, baik untuk pengguna barang maupun pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan untuk BMN dengan kondisi rusak berat sampai dengan triwulan III tahun 2025, baik untuk pengguna barang maupun pengelola barang (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%). 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)	Tim Kerja Dukungan Manajerial Pusluh KP

INDIKATOR KINERJA
PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	Hitung jumlah rekomendasi dukungan sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh PSSSDMKP untuk LSP sektor KP
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan C. Persentase layanan dukungan manajemen internal
		3	Indeks Profesional ASN PSSSDMKP (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				$NE_{Alokasi}$: Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO $WPenggunaan_{SBK}$: Bobot Penggunaan SBK $WE_{Alokasi}$: Bobot Efisiensi Alokasi
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) + (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP PSSSDMKP (%)	$x = \frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini

INDIKATOR KINERJA
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	Jumlah Laporan dan/atau kerangka acuan kerja (KAK) yang disusun di tahun berjalan.
2	Tata Kelola Pemerintahan yang	2	Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	$Nilai\ IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				$\text{Nilai IP ASN Unit Organisasi} = \frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$
	3	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)		Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (Self Assessment Questioner) Tim Penilai Internal KKP
	4	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)		- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) + (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
	5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)		NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $\text{NKPA Satker} = (\text{CRO} \times \text{W}_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times \text{WPenggunaan}_{\text{SBK}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times \text{WE}_{\text{Alokasi}})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
	6	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)		Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
				3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP.		
				Kategori	Nilai	Predikat
				AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
				A	>80 – 90	Memuaskan
				BB	>70 – 80	Sangat Baik
				B	>60 – 70	Baik
				CC	>50-60	Cukup
				C	>30 – 50	Kurang
				D	0 – 30	Sangat Kurang
				7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BPPSDM}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BPPSDM}} \times 100\%$
8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini				
9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BBRSEKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)				

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%). 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

INDIKATOR KINERJA

BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BPPSDM}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BPPSDM}} \times 100\%$
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																										
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																										
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																												
A	>80 – 90	Memuaskan																												
BB	>70 – 80	Sangat Baik																												
B	>60 – 70	Baik																												
CC	>50-60	Cukup																												
C	>30 – 50	Kurang																												
D	0 – 30	Sangat Kurang																												
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan _{SBK} : Penggunaan SBK NE _{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W _{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan _{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE _{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi																										

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		5 Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BBRP2BKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%). 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		8	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	FORMULA PENGUKURAN - Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) dan dokumen lainnya (buah) sesuai arahan pimpinan adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan. - Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) dan dokumen lainnya (buah) sesuai arahan pimpinan adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan kegiatan lainnya pada tahun berjalan. - Persentase layanan dukungan manajemen internal BBRP2BKP (%): $\% \text{ layanan} = \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal + jumlah dokumen lainnya sesuai arahan pimpinan}}{\text{Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal}} \times 100\%$

INDIKATOR KINERJA
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN										
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$										
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$										
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB
Kategori	Nilai	Predikat												
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan												
A	>80 – 90	Memuaskan												
BB	>70 – 80	Sangat Baik												

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
				B	>60 – 70	Baik
				CC	>50-60	Cukup
				C	>30 – 50	Kurang
				D	0 – 30	Sangat Kurang
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan _{SBK} : Penggunaan SBK NE _{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W _{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan _{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE _{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi		
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	$Nilai\ IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$ $Nilai\ IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ Pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ Unit\ Organisas}$		
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	$x = \frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang		

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup LPTK diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%). 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		8.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang disampaikan dan ditetapkan dalam Berita Acara penilaian oleh Tim Penilai Sekretariat BPPSDMKP.
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	Aspek/Formulasi pengukuran /penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) - a.penciptaan arsip (25%), - b.penggunaan arsip (25%),

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				c.penyusutan arsip (25%), d.pemeliharaan arsip (25%). 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BPPSDM}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BPPSDM}} \times 100\%$
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
				$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$																								
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																										
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker																										

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	Aspek/Formulasi pengukuran /penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) - a.penciptaan arsip (25%), - b.penggunaan arsip (25%), - c.penyusutan arsip (25%), - d.pemeliharaan arsip (25%). 2. sumber daya kearsipan (bobot 50%) - a.sumber daya manusia kearsipan (50%), - b.prasarana dan sarana (50%)
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup LRSDKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (<i>Self Assessment Quesioner</i>) Tim Penilai Internal KKP
		10	Nilai PNBPN LRSDKP (Rupiah)	Nilai PNBPN Satker PNBPN = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN Lainnya + Nilai PNBPN BLU
		11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRBIH diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		8.	Nilai PNPB Satker BRBIH (Rupiah)	$\text{Nilai PNPB Satker PNPB} = \text{Nilai PNPB SDA} + \text{Nilai PNPB Lainnya}$
		9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (<i>Self Assessment Quesioner</i>) Tim Penilai Internal KKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN										
1 .	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%)	$\frac{Jumlah\ Rekomendasi\ ITJEN\ yang\ telah\ tuntas\ ditindaklanjuti\ oleh\ Unit\ Kerja}{Jumlah\ Rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ Unit\ Kerja} \times 100\%$										
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$										
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB
Kategori	Nilai	Predikat												
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan												
A	>80 – 90	Memuaskan												
BB	>70 – 80	Sangat Baik												

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
				B	>60 – 70	Baik
				CC	>50-60	Cukup
				C	>30 – 50	Kurang
				D	0 – 30	Sangat Kurang
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi		
		5.	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin $Nilai\ IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ Pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}$		
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	$x = \frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRPSDI diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		8.	Nilai PNBPN Satker BRPSDI (Rupiah)	Nilai PNBPN Satker PNBPN = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN Lainnya
		9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	Jumlah kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti yang masih berlaku di pada tahun berjalan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian
		11.	Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)	Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (<i>Self Assessment Quesioner</i>) Tim Penilai Internal KKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																										
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </table>			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																												
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																												
A	>80 – 90	Memuaskan																												
BB	>70 – 80	Sangat Baik																												
B	>60 – 70	Baik																												
CC	>50-60	Cukup																												
C	>30 – 50	Kurang																												
D	0 – 30	Sangat Kurang																												
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
			W_{CRO} : Bobot Capaian RO $WPenggunaan_{SBK}$: Bobot Penggunaan SBK $WE_{Alokasi}$: Bobot Efisiensi Alokasi
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPI (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRPI diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		8	Nilai PNPB BRPI (Rupiah)	Nilai PNPB Satker PNPB = Nilai PNPB SDA + Nilai PNPB Lainnya
		9	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti di BRPI (Kemitraan)	Jumlah kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti yang masih berlaku di pada tahun berjalan
		10	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (<i>Self Assessment Quesioner</i>) Tim Penilai Internal KKP
		11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
BALAI RISET PERIKANAN LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		Perbaikan Kinerja BRPL (%)																										
	2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPL (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$																									
	3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPL (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>		Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
	Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																										
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPL (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
			$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
	5.	Indeks Profesionalitas ASN BRPL (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$
	6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BRPL (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
	7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPL (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRPL diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		8.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BRPL (proposal)	Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang disampaikan dan ditetapkan dalam Berita Acara penilaian oleh Tim Penilai Sekretariat BPPSDMKP.
		9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPL (Kemitraan)	Jumlah kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti yang masih berlaku di pada tahun berjalan

INDIKATOR KINERJA
LOKA RISET PERIKANAN TUNA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																						
bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		perbaikan kinerja LRPT (%)																								
	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$																							
	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		5 Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ Pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}$</i>
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	$x = \frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRPT (%) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup LRPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai) Aspek/Formulasi pengukuran /penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) - a.penciptaan arsip (25%), - b.penggunaan arsip (25%), - c.penyusutan arsip (25%), - d.pemeliharaan arsip (25%). 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) - a.sumber daya manusia kearsipan (50%),

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				b.prasarana dan sarana (50%)
		9	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (<i>Self Assessment Quesioner</i>) Tim Penilai Internal KKP

INDIKATOR KINERJA
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1 .	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRBRL (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
				4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
		AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi																										
5.	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i>																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
			$\text{Nilai IP ASN Unit Organisasi} = \frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$
		6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup LRBRL diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		8.	Nilai PNBP LRBRL (Rupiah)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya
		9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	Jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian
		11.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (<i>Self Assessment Quesioner</i>) Tim Penilai Internal KKP

INDIKATOR KINERJA
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1 /K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$																								
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
	Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																										
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:																								

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup LRMPHP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		8.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	Jumlah kemitraan yang terjalin dan/atau masih berlaku pada tahun berjalan antara LRMPHP dengan pihak eksternal KKP dalam bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan serta pemanfaatan aset LRMPHP
		9.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (proposal)	Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang disampaikan dan ditetapkan dalam Berita Acara penilaian oleh Tim Penilai Sekretariat BPPSDMKP.

INDIKATOR KINERJA
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelas kemampuan kelompoknya (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama), dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah diberikan pendampingan, penilaian serta dalam proses penetapan, sesuai dengan Permen KP No. 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk/ ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/ atau telah dikukuhkan oleh instansi berwenang sesuai Permen KP No. 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
		4	Nilai PNBPN Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	Nilai PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN lainnya
		5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)	Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang mendapatkan pendampingan Penyuluh Perikanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	Jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sesuai binaannya
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	Jumlah Penyuluh Perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh <i>Assesment Center</i> KKP
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	$x = \frac{\text{Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Pelatihan Teknis}}{\text{Total jumlah seluruh Penyuluh Perikanan}} \times 100\%$
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)	Jumlah sarana fisik dan/atau non fisik yang diperoleh melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun berjalan lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
		10	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit)	Jumlah prasarana fisik dan/atau non fisik yang diperoleh melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun berjalan lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan	11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan internasional yang telah disepakati oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																
	Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		Satker BRPPUPP (Dokumen)																	
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BRPPUPP}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BRPPUPP}} \times 100\%$																
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$																
		14	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC
Kategori	Nilai	Predikat																		
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																		
A	>80 – 90	Memuaskan																		
BB	>70 – 80	Sangat Baik																		
B	>60 – 70	Baik																		
CC	>50-60	Cukup																		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
				C	>30 – 50	Kurang
				D	0 – 30	Sangat Kurang
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi		
		16	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin $Nilai\ IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ Pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}$		
		17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	$x = \frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini		
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRPPUPP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

INDIKATOR KINERJA
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya	Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelas kemampuan kelompoknya (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama), dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah diberikan pendampingan, penilaian serta

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
			oleh BRPBATPP (Kelompok)	dalam proses penetapan, sesuai dengan Permen KP No. 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk/ ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/ atau telah dikukuhkan oleh instansi berwenang sesuai Permen KP No. 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
		4	Nilai PNBPN Satker BRPBATPP (Rupiah Milyar)	Nilai PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN lainnya
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBATPP (Unit)	Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang mendapatkan pendampingan Penyuluh Perikanan
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BRPBATPP (Paket)	Jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sesuai binaannya
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	Jumlah Penyuluh Perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh <i>Assesment Center</i> KKP

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBATPP (Orang)	Jumlah Penyuluh KP yang lulus Pelatihan Teknis
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBATPP (Dokumen)	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan internasional yang telah disepakati oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBATPP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BRPBATPP}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BRPBATPP}} \times 100\%$
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN																								
				Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
		AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
		A	>80 – 90	Memuaskan																								
		BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
		B	>60 – 70	Baik																								
		CC	>50-60	Cukup																								
		C	>30 – 50	Kurang																								
		D	0 – 30	Sangat Kurang																								
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi																								
14	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ Pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ Unit\ Organisas}$</i>																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBATPP (%) $x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPBATPP (%) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRPBATPP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		17	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%) A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
				diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. <i>Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal =</i> $\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{Jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$

INDIKATOR KINERJA
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok)	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP no. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok)	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah dikukuhkan oleh Instansi yang berwenang mengukuhkan berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan
		4	Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (Unit)	Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket)	Jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sesuai binaannya
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	Hitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh <i>Assesment Center</i> KKP
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	Jumlah Penyuluh KP yang lulus Pelatihan Teknis

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN										
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)	Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Kerjasama lingkup antar Lembaga dan internasional dan disepakati Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bersama para pihak kerja sama										
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$										
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$										
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB
Kategori	Nilai	Predikat												
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan												
A	>80 – 90	Memuaskan												
BB	>70 – 80	Sangat Baik												

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
				B	>60 – 70	Baik
				CC	>50-60	Cukup
				C	>30 – 50	Kurang
				D	0 – 30	Sangat Kurang
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi		
		14	Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin $Nilai\ IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ Pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}$		
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)	$x = \frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BBRBLPP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

INDIKATOR KINERJA
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelas kemampuan kelompoknya (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama), dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah diberikan pendampingan, penilaian serta dalam proses penetapan, sesuai dengan Permen KP No. 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk/ ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/ atau telah dikukuhkan oleh instansi berwenang sesuai Permen KP No. 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
		4	Nilai PNBPN Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	Nilai PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN lainnya
		5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)	Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang mendapatkan pendampingan Penyuluh Perikanan
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi	6	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)	Jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sesuai binaannya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
	Kelautan dan Perikanan			
3	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Jumlah kelompok yang mendapatkan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan dalam kegiatan <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV) UPT dan/atau desa
4	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Penyuluh Perikanan yg Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	Hitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh <i>Assesment Center</i> KKP
		9	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)	Jumlah Penyuluh KP yang lulus Pelatihan Teknis
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)	Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Kerjasama lingkup antar Lembaga dan internasional dan disepakati Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bersama para pihak kerja sama
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
	Kelautan dan Perikanan	12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$																								
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																										
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		15	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin Nilai IP ASN Unit Organisasi $= \frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$
		16	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRPBAPPP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: - Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) - Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

INDIKATOR KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN

• Tusi Pelatihan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Medan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (orang)	Jumlah lulusan pelatihan masyarakat Kelautan dan Perikanan di BPPP Medan yang berhasil memperoleh pekerjaan dan atau mengembangkan usahanya.
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Medan (orang)	Akumulasi jumlah masyarakat KP yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan dari BPPP Medan
		3	Nilai PNBPN Satker BPPP Medan (Rupiah Miliar)	Nilai PBNP sektor KP yang dihasilkan BPPP Medan
2	Tata Kelola pemerintahan	4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan			Internal BPPP Medan (%)	A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan C. Persentase layanan dukungan manajemen internal		
	5		Indeks Profesionalitas ASN BPPP Medan (indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi</i> <i>=</i> $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisas}}$		
	6		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Medan (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$		
	7		Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Medan (nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP.		
				Kategori	Nilai	Predikat

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN			
				AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	
				A	>80 – 90	Memuaskan	
				BB	>70 – 80	Sangat Baik	
				B	>60 – 70	Baik	
				CC	>50-60	Cukup	
				C	>30 – 50	Kurang	
				D	0 – 30	Sangat Kurang	
				8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Medan (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BPPP Medan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)	
	9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$				

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			BPPP Medan (%)	Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Medan (nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Medan (nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

- Tusi Penyuluhan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Medan (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala BPPP Medan.
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Medan (Kelompok)	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP no. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Medan (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah dikukuhkan oleh BPPP Medan
		4	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Medan (Unit)	Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan BPPP Medan
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Medan (orang)	Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan BPPP Medan yang lulus pelatihan teknis

INDIKATOR KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

• Tusi Pelatihan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	Jumlah lulusan pelatihan masyarakat Kelautan dan Perikanan di BPPP Tegal yang berhasil memperoleh pekerjaan dan atau mengembangkan usahanya.
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (orang)	Akumulasi jumlah masyarakat KP yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan dari BPPP Tegal
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	Nilai PBNP sektor KP yang dihasilkan BPPP Tegal
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (orang)	Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP Tegal
		5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	Jumlah sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal pada BPPP Tegal
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	Jumlah prarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal pada BPPP Tegal

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan C. Persentase layanan dukungan manajemen internal
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
				Kategori	Nilai	Predikat
				AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
				A	>80 – 90	Memuaskan
				BB	>70 – 80	Sangat Baik
				B	>60 – 70	Baik
				CC	>50-60	Cukup
				C	>30 – 50	Kurang
				D	0 – 30	Sangat Kurang
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BPPP Tegal diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)		
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

• Tusi Penyuluhan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala BPPP Tegal.

INDIKATOR KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

• Tusi Pelatihan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	Jumlah lulusan pelatihan masyarakat Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi yang berhasil memperoleh pekerjaan dan atau mengembangkan usahanya.
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	Akumulasi jumlah masyarakat KP yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan dari BPPP Banyuwangi
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	Nilai PBNP sektor KP yang dihasilkan BPPP Banyuwangi
		4	Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP Banyuwangi
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan	5	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																				
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan C. Persentase layanan dukungan manajemen internal																				
	6	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	$Nilai\ IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$ $Nilai\ IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ Pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ Unit\ Organisas}$																					
	7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	$\frac{Jumlah\ Rekomendasi\ ITJEN\ yang\ telah\ tuntas\ ditindaklanjuti\ oleh\ Unit\ Kerja}{Jumlah\ Rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ Unit\ Kerja} \times 100\%$																					
	8	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr></table>		Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50
Kategori	Nilai	Predikat																						
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																						
A	>80 – 90	Memuaskan																						
BB	>70 – 80	Sangat Baik																						
B	>60 – 70	Baik																						
CC	>50-60	Cukup																						
C	>30 – 50	Kurang																						

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN			
			<table><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	D	0 – 30	Sangat Kurang
	D	0 – 30	Sangat Kurang			
	9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BPPP Banyuwangi diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)			
	10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini			
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.				

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

• Tusi Penyuluhan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala BPPP Banyuwangi.
		2	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya,

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN
			Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP no. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
		3	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah dikukuhkan oleh BPPP Banyuwangi
		4	Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan BPPP Banyuwangi
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5	Jumlah Penyuluh Kelautan Dan Perikanan yang Tersertifikasi di BPPP Banyuwangi	Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS di BPPP Banyuwangi yang lulus penilaian sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Assesment Center KKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

- Tusi Pelatihan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	Jumlah lulusan pelatihan masyarakat Kelautan dan Perikanan di BPPP Bitung yang berhasil memperoleh pekerjaan dan atau mengembangkan usahanya.
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	Akumulasi jumlah masyarakat KP yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan dari BPPP Bitung
		3	Nilai PBNP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)	Nilai PBNP sektor KP yang dihasilkan BPPP Bitung
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan C. Persentase layanan dukungan manajemen internal
		5	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>
		6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																										
			perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)																											
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																										
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																												
A	>80 – 90	Memuaskan																												
BB	>70 – 80	Sangat Baik																												
B	>60 – 70	Baik																												
CC	>50-60	Cukup																												
C	>30 – 50	Kurang																												
D	0 – 30	Sangat Kurang																												
8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BPPP Bitung diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);																												

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				Penggunaan _{SBK} : Penggunaan SBK NE _{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W _{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan _{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE _{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

• Tusi Penyuluhan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala BPPP Bitung.
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP no. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah dikukuhkan oleh BPPP Bitung
		4	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan	Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan BPPP Bitung

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS di BPPP Bitung yang lulus penilaian sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Assesment Center KKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

• Tusi Pelatihan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	Jumlah lulusan pelatihan masyarakat Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon yang berhasil memperoleh pekerjaan dan atau mengembangkan usahanya.
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	Akumulasi jumlah masyarakat KP yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan dari BPPP Ambon
		3	Nilai PBNP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	Nilai PBNP sektor KP yang dihasilkan BPPP Ambon
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	4	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN														
Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		(%)		A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan C. Persentase layanan dukungan manajemen internal														
	5	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)		$Nilai\ IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$ $Nilai\ IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ Pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ Unit\ Organisas}$														
	6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPP Ambon (%)		$\frac{Jumlah\ Rekomendasi\ ITJEN\ yang\ telah\ tuntas\ ditindaklanjuti\ oleh\ Unit\ Kerja}{Jumlah\ Rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ Unit\ Kerja} \times 100\%$														
	7	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)		Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70
Kategori	Nilai	Predikat																
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																
A	>80 – 90	Memuaskan																
BB	>70 – 80	Sangat Baik																
B	>60 – 70	Baik																

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
				CC	>50-60	Cukup
				C	>30 – 50	Kurang
				D	0 – 30	Sangat Kurang
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BPPP Ambon diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)		
		9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Ambon (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

• Tusi Penyuluhan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala BPPP Ambon.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		2	Kelompok Kelautan dan Perikanan Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP no. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah dikukuhkan oleh BPPP Ambon
		4	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi Yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Ambon (Unit)	Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan BPPP Ambon
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan Yang Tersertifikasi di BPPP Ambon (Orang)	Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS di BPPP Ambon yang lulus penilaian sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Assesment Center KKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Nilai PNBP Satker BDA Sukamandi (Rupiah Miliar)	Nilai PBNP sektor KP yang dihasilkan BDA Sukamandi
2	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	2	Aparatur KP yang dilatih Blended (orang)	Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode blended training dinyatakan lulus Diklat serta mendapatkan sertifikat Diklat.
		3	Aparatur KP yang dilatih Full Online (orang)	Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode fullonline training dan dinyatakan lulus Diklat serta mendapatkan sertifikat Diklat.
		4	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	Jumlah instruktur dan widyaiswara yang tersertifikasi
		5	Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	Jumlah Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya	6	Persentase layanan dukungan manajemen internal BDA Sukamandi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan C. Persentase layanan dukungan manajemen internal

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Indeks Profesionalitas ASN BDA Sukamandi (indeks)	$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$ $\text{Nilai IP ASN Unit Organisasi} = \frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisas}}$																									
	8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BDA Sukamandi (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$																									
	9	Penilaian Mandiri SAKIP BDA Sukamandi (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>		Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
	Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																										
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BDA	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BDA Sukamandi diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			Sukamandi (%)	Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BDA Sukamandi (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BDA Sukamandi (Nilai)	• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BDA Sukamandi (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		2	Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBPN satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	Nilai PNBPN Satker PNBPN = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN Lainnya
		5	Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	Jumlah paket kajian yang dilaksanakan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN										
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	a. Akumulasi jumlah kolompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mendapatkan pendampingan peningkatan kompetensi oleh satuan pendidikan KP; dan atau b. Kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung yang menerapkan hasil Pengabdian Pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang diterapkan										
		10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: a. Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional b. Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan										
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	$\frac{Jumlah\ Rekomendasi\ ITJEN\ yang\ telah\ tuntas\ ditindaklanjuti\ oleh\ Unit\ Kerja}{Jumlah\ Rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ Unit\ Kerja} \times 100\%$										
		12	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB
Kategori	Nilai	Predikat												
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan												
A	>80 – 90	Memuaskan												
BB	>70 – 80	Sangat Baik												

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN			
				B	>60 – 70	Baik	
				CC	>50-60	Cukup	
				C	>30 – 50	Kurang	
				D	0 – 30	Sangat Kurang	
		13	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisas}}$</i>			
14	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini					
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik AUP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);					

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		18	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK KP SIDOARJO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Sidoarjo yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Sidoarjo (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sidoarjo yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBP satker Politeknik KP Sidoarjo (Rp. Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya + Nilai PNBP BLU
		5	Kerjasama Politenik KP Sidoarjo yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Sidoarjo yang bersertifikasi	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			kompetensi (%)	A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang besertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Sidoarjo (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sidoarjo (Paket)	Jumlah paket kajian yang dilaksanakan
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sidoarjo (kelompok)	a. Akumulasi jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mendapatkan pendampingan peningkatan kompetensi oleh satuan pendidikan KP; dan atau b. Kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung yang menerapkan hasil Pengabdian Pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang diterapkan
		10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Sidoarjo (Lembaga)	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: a. Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional a. Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		11	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan dan Perikanan Politeknik KP Sidoarjo yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	Akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi
		12	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada Politeknik KP Sidoarjo (Paket)	Akumulasi jumlah pengadaan peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sidoarjo (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		14	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Sidoarjo (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
				Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP.																								
				<table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
				Kategori	Nilai	Predikat																						
				AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																						
				A	>80 – 90	Memuaskan																						
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
15	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Sidoarjo (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisas}}$</i>																										
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sidoarjo (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini																										
17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Sidoarjo (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Sidoarjo diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Sidoarjo (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		19	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Politeknik KP Sidoarjo (Proposal)	Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang disampaikan dan ditetapkan dalam Berita Acara penilaian oleh Tim Penilai Sekretariat BPPSDMKP.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		20	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Sidoarjo (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK KP BITUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		4	Nilai PNBP satker Politeknik KP Bitung (Rp. Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya
		5	Kerjasama Politeknik KP Bitung yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Bitung (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Bitung (Lembaga)	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: - Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional - Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$																								
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
		AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
11	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$																										
12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			SIRUP Politeknik KP Bitung (%)	Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Bitung (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Bitung diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		16	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Bitung (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK KP SORONG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
Perikanan Yang Kompeten		yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/ mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
	2	Jumlah lulusan Politeknik KP Sorong (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
	3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
	4	Nilai PNBPN satker Politeknik KP Sorong (Rp. Miliar)	Nilai PNBPN Satker PNBPN = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN Lainnya
	5	Kerjasama Politeknik KP Sorong yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
	6	Persentase lulusan Politeknik KP Sorong yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
	7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Sorong (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Sorong (Lembaga)	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: a. Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional a. Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan
		9	Unit Kerja Politeknik KP Sorong yang dibangun berpredikat WBK/WBBM (unit kerja)	• Tim pembina/pendamping BPPSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat Pendidikan KP, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. • Tim pembina/pendamping BPPSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat indikator hasil WBK
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Sorong (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
				4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP.																								
				<table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
		AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
		A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
12	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Sorong (Indeks)	$Nilai\ IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$ $Nilai\ IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ Pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ Unit\ Organisas}$																										
13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong (%)	$x = \frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini																										
14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Sorong (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Sorong diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				W_{CRO} : Bobot Capaian RO $WPenggunaan_{SBK}$: Bobot Penggunaan SBK $WE_{Alokasi}$: Bobot Efisiensi Alokasi
		17	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Sorong (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK KP KARAWANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Karawang yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Karawang (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Karawang yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		4	Nilai PNBPN satker Politeknik KP Karawang (Rp. Miliar)	Nilai PNBPN Satker PNBPN = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN Lainnya
		5	Kerjasama Politenik KP Karawang yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Karawang yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Karawang (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru/ Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Karawang (Paket)	Jumlah paket kajian yang dilaksanakan
		9	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Karawang (Lembaga)	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: a. Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				b. Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan
		10	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan dan Perikanan Politeknik KP Karawang yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	Akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi
		11	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada Politeknik KP Karawang (Paket)	Akumulasi jumlah pengadaan peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi
		12	Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada Politeknik KP Karawang (Paket)	Akumulasi jumlah pengadaan gedung dan bangunan
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya	13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Karawang (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
	Manusia Kelautan dan Perikanan	14	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Karawang (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
		AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
15	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Karawang (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisas}}$</i>																										
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Karawang (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Karawang (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Karawang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Karawang (Nilai)	• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		19 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Karawang (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		20	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Karawang (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK KP BONE

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Bone (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBP satker Politeknik KP Bone (Rp. Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya
		5	Kerjasama Politeknik KP Bone yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Bone yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Bone (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																						
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Unit Kerja Politeknik KP Bone yang dibangun berpredikat WBK/WBBM (unit kerja)	- Tim pembina/pendamping BPPSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat Pendidikan KP, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. - Tim pembina/pendamping BPPSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat indikator hasil WBK																						
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bone (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$																						
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bone (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: - perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		11 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bone (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>
		12 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bone (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		13 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Bone (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Bone diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		14 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bone (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bone (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		16 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Bone (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK KP KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Kupang yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Kupang (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Kupang yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBP satker Politeknik KP Kupang (Rp. Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya
		5	Kerjasama Politeknik KP Kupang yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Kupang yang bersertifikasi	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		kompetensi (%)	A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang besertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Kupang (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Unit Kerja Politeknik KP Kupang yang dibangun berpredikat WBK/WBBM (unit kerja)	- Tim pembina/pendamping BPPSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat Pendidikan KP, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. - Tim pembina/pendamping BPPSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat indikator hasil WBK
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Kupang (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Kupang (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
				1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP.		
				Kategori	Nilai	Predikat
				AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
				A	>80 – 90	Memuaskan
				BB	>70 – 80	Sangat Baik
				B	>60 – 70	Baik
				CC	>50-60	Cukup
				C	>30 – 50	Kurang
				D	0 – 30	Sangat Kurang
		11	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Kupang (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisas}}$		
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Kupang (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini		
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Kupang (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Kupang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Kupang (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Kupang (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				W_{CRO} : Bobot Capaian RO $WPenggunaan_{SBK}$: Bobot Penggunaan SBK $WE_{Alokasi}$: Bobot Efisiensi Alokasi
		16	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Kupang (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK KP DUMAI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Dumai yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Dumai (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			perikanan Politeknik KP Dumai yang kompeten (Orang)	peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBPN satker Politeknik KP Dumai (Rp. Miliar)	Nilai PNBPN Satker PNBPN = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN Lainnya
		5	Kerjasama Politeknik KP Dumai yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Dumai yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Dumai (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Dumai (Paket)	Jumlah paket kajian yang dilaksanakan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Dumai (kelompok)	a. Akumulasi jumlah kolompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mendapatkan pendampingan peningkatan kompetensi oleh satuan pendidikan KP; dan atau b. Kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung yang menerapkan hasil Pengabdian Pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang diterapkan
		10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Dumai (Lembaga)	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: a. Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional a. Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan
		11	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan dan Perikanan Politeknik KP Dumai yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	Akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	12	Unit Kerja Politeknik KP Dumai yang dibangun berpredikat WBK/WBBM (unit kerja)	- Tim pembina/pendamping BPPSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat Pendidikan KP, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. - Tim pembina/pendamping BPPSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat indikator hasil WBK
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN																								
		perbaikan kinerja Politeknik KP Dumai (%)																									
	14	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Dumai (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
	Kategori	Nilai	Predikat																								
	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
	A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
15	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Dumai (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisas}}$</i>																									
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Dumai (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini																									

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Dumai (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Dumai diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Dumai (Nilai)	• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		19 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Dumai (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		20	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Dumai (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK KP PANGANDARAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Pangandaran yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/ mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		2 Jumlah lulusan Politeknik KP Pangandaran (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Pangandaran yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru
		4 Nilai PNBP satker Politeknik KP Pangandaran (Rp. Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya
		5 Kerjasama Politeknik KP Pangandaran yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6 Persentase lulusan Politeknik KP Pangandaran yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
		7 Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Pangandaran (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																						
		8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Pangandaran (Lembaga)	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: a. Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional a. Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan																						
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Pangandaran (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$																						
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Pangandaran (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		11 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Pangandaran (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>
		12 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Pangandaran (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		13 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Pangandaran (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Pangandaran diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		14 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Pangandaran (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Pangandaran (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		16 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Pangandaran (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK KP JEMBRANA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Jembrana yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Jembrana (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Jembrana yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBP satker Politeknik KP Jembrana (Rp. Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya
		5	Kerjasama Politeknik KP Jembrana yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Jembrana yang bersertifikasi	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			kompetensi (%)	B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang besertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Jembrana (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Jembrana (Lembaga)	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: a. Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional b. Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Jembrana (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Jembrana (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
				Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP.		
				Kategori	Nilai	Predikat
				AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
				A	>80 – 90	Memuaskan
				BB	>70 – 80	Sangat Baik
				B	>60 – 70	Baik
				CC	>50-60	Cukup
				C	>30 – 50	Kurang
				D	0 – 30	Sangat Kurang
		11	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Jembrana (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisas}}$		
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Jembrana (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini		
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Jembrana (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Jembrana diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Jembrana (Nilai)	• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Jembrana (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				WPenggunaan _{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE _{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		16	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Jembrana (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan Akademi Komunitas KP Wakatobi (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		4	Nilai PNBPN satker Akademi Komunitas KP Wakatobi (Rp. Miliar)	Nilai PNBPN Satker PNBPN = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN Lainnya
		5	Kerjasama Akademi Komunitas KP Wakatobi yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Akademi Komunitas KP Wakatobi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Akademi Komunitas KP Wakatobi (Lembaga)	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: - Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional - Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																						
		9	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan dan Perikanan Akademi Komunitas KP Wakatobi yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	Akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi																						
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Akademi Komunitas KP Wakatobi (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$																						
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Akademi Komunitas KP Wakatobi (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		12 Indeks Profesionalitas ASN Akademik Komunitas KP Wakatobi (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>
		13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Akademik Komunitas KP Wakatobi (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Akademik Komunitas KP Wakatobi (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Akademik Komunitas Wakatobi diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		15 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Akademi Komunitas KP Wakatobi (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
		16 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Akademi Komunitas KP Wakatobi (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		17 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Akademi Komunitas KP Wakatobi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
SUPM LADONG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Ladong yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan SUPM Ladong (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Ladong yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBP satker SUPM Ladong (Rp. Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya
		5	Kerjasama SUPM Ladong yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan SUPM Ladong yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																						
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Ladong (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%																						
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Ladong (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$																						
		9	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Ladong (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		10 Indeks Profesionalitas ASN SUPM Ladong (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>
		11 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Ladong (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		12 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Ladong (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup SUPM Ladong diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERHITUNGAN
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Ladong (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
		14 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Ladong (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		15 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Ladong (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
SUPM PARIAMAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan SUPM Pariaman (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBP satker SUPM Pariaman (Rp. Miliar)	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya
		5	Kerjasama SUPM Pariaman yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan SUPM Pariaman yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Pariaman (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada SUPM Pariaman (Paket)	Akumulasi jumlah pengadaan peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		10	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pariaman (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN		
				Kategori	Nilai	Predikat
				AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
				A	>80 – 90	Memuaskan
				BB	>70 – 80	Sangat Baik
				B	>60 – 70	Baik
				CC	>50-60	Cukup
				C	>30 – 50	Kurang
				D	0 – 30	Sangat Kurang
		11	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman (Indeks)	<i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$</i>		
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini		
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pariaman (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup SUPM Pariaman diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div (\text{Konversi Bobot} - \text{Dispensi SPM})$
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		16	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pariaman (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
SUPM KOTAAGUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Kotaagung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan SUPM Kotaagung (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Kotaagung yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBP satker	Nilai PNBP Satker PNBP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			SUPM Kotaagung (Rp. Miliar)	
		5	Kerjasama SUPM Kotaagung yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan SUPM Kotaagung yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Kotaagung (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Kotaagung (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		9	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Kotaagung (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
				Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
		AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
		A	>80 – 90	Memuaskan																								
		BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
		B	>60 – 70	Baik																								
		CC	>50-60	Cukup																								
		C	>30 – 50	Kurang																								
		D	0 – 30	Sangat Kurang																								
		10	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Kotaagung (Indeks)	$Nilai\ IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$ $Nilai\ IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ Pegawai\ ASN\ Unit\ Organisasi}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ Unit\ Organisas}$																								
11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Kotaagung (%)	$x = \frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini																										
12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Kotaagung (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup SUPM Kotaagung diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Kotaagung (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Kotaagung (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan _{SBK} : Penggunaan SBK NE _{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W _{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan _{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE _{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		15	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Kotaagung (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
SUPM TEGAL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Tegal yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja
		2	Jumlah lulusan SUPM Tegal (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Tegal yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBPN satker SUPM Tegal (Rp. Miliar)	Nilai PNBPN Satker PNBPN = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN Lainnya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		5	Kerjasama SUPM Tegal yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan SUPM Tegal yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Tegal (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan dan Perikanan SUPM Tegal yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	Akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Tegal (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$
		10	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Tegal (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
				2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
		AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
		A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
11	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Tegal (Indeks)	Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin Nilai IP ASN Unit Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisas}}$																										
12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Tegal (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini																										
13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Tegal (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup SUPM Tegal diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Tegal (Nilai)	• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Tegal (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		16	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Tegal (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
SUPM WAEHERU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja. / Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		2	Jumlah lulusan SUPM Waeheru (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten (Orang)	Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda / / Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan KP baik yang aktif maupun yang tunda
		4	Nilai PNBPN satker SUPM Waeheru (Rp. Miliar)	Nilai PNBPN Satker PNBPN = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN Lainnya
		5	Kerjasama SUPM Waeheru yang disepakati (Kesepakatan)	Jumlah usulan kerjasama yang disepakati di tahun berjalan.
		6	Persentase lulusan SUPM Waeheru yang bersertifikasi kompetensi (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Waeheru (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru / Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
		8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Waeheru	Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut: a. Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		(Lembaga)	a. Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan																								
		9	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan dan Perikanan SUPM Waeheru yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	Akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi																								
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$																								
		11	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
					Kategori	Nilai	Predikat																					
					AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																					
					A	>80 – 90	Memuaskan																					
					BB	>70 – 80	Sangat Baik																					
					B	>60 – 70	Baik																					
					CC	>50-60	Cukup																					
					C	>30 – 50	Kurang																					
					D	0 – 30	Sangat Kurang																					
					12	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru	$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$																					

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
			(Indeks)	$\text{Nilai IP ASN Unit Organisasi} = \frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh Pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisas}}$
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Waeheru (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup SUPM Waeheru diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waetheru (Nilai)	- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waetheru (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		17	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waetheru (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
SUPM PONTIANAK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$																								
		2	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																										
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
3	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		4	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pontianak (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup SUPM Pontianak diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		7	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C = Persentase capaian

INDIKATOR KINERJA
SUPM SORONG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN																								
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Sorong (%)	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$																								
		2	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Sorong (Nilai)	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 1. perencanaan kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi kinerja Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP Sekretariat, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretariat BPPSDMKP. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
		Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																										
A	>80 – 90	Memuaskan																										
BB	>70 – 80	Sangat Baik																										
B	>60 – 70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30 – 50	Kurang																										
D	0 – 30	Sangat Kurang																										
3	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Sorong (%)	$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang																										

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
				diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini
		4	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Sorong (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup SUPM Sorong diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%) 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Sorong (Nilai)	• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div (Konversi\ Bobot - Dispensi\ SPM)$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PERHITUNGAN
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Sorong (Nilai)	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
		7	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Sorong (%)	$C = \frac{B}{A} \times 100\%$ A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan C= Persentase capaian

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Slinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D